

2. LANDASAN TEORI

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1. Divisi HARKAN PT PAL INDONESIA

PT PAL Indonesia merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang pertahanan pembuatan kapal KRI (Kapal Republik Indonesia) maupun non KRI. PT PAL Indonesia memiliki beberapa divisi salah satunya Divisi Harkan (Pemeliharaan dan Perbaikan) yang bergerak untuk perbaikan dan pemeliharaan kapal baik kapal KRI maupun non KRI (PT PAL Indonesia, 2023). Divisi Harkan melayani berbagai pemeliharaan dan perbaikan kapal yakni *Docking Repair*, *Floating Repair*, serta mengimplementasikan perkembangan teknologi elektronika pada kapal. Pekerjaan Divisi Harkan dilakukan dengan penyelesaian proyek kapal dalam perjanjian waktu tertentu.



Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Divisi Harkan

Divisi Harkan mempunyai struktur organisasi yakni Kepala Divisi sebagai Struktur tertingginya dan dibawah dari Kepala Divisi ada Kepala Departemen serta di bawah Kepala Departemen terdapat Kepala Bengkel. Kepala Manajer Proyek adalah penanggung jawab dari beberapa proyek yang sedang dikerjakan oleh Divisi Harkan. Kepala Manajer Proyek tidak tergabung secara penuh dalam struktural dari Divisi Harkan. Hal itu karena Kepala Manajer Proyek selalu berganti mengikuti dari proyek yang sedang dikerjakan di Divisi Harkan.

2.1.2. Prosedur Kerja Lembur Divisi HARKAN PT PAL INDONESIA

PT PAL Indonesia adalah Perusahaan yang memiliki banyak pegawai dari berbagai divisi. Tidak sedikit proyek pekerjaan yang sedang dijalani saat ini oleh karena itu PT PAL Indonesia khususnya Divisi Harkan sangat sering untuk melakukan pekerjaan lembur guna menyelesaikan tenggat waktu dari masing-masing proyek yang ada. Divisi Harkan PT PAL Indonesia juga memiliki standar operasional untuk prosedur kerja lemburnya, hari efektif biasa jam kerja lembur dibatasi pada empat jam sedangkan pada hari libur atau pada tanggal merah waktu lembur dibatasi pada enam jam lembur terhitung satu jam setelah jam kerja efektif berakhir (PT PAL Indonesia, 2003). Standar operasional tersebut dibuat agar proses kerja lembur di PT PAL Indonesia mempunyai acuan peraturan dan dapat terkoordinasi dengan baik.

2.1.3. Surat Perintah Kerja Lembur

Setiap Perusahaan memiliki sistem dan aturan tersendiri terhadap mengelola pekerjaan lemburnya. Secara umum Perusahaan memiliki surat keterangan untuk pencatatan lemburnya yang biasa disebut oleh surat perintah kerja lembur (SPKL). SPKL adalah sebuah surat keterangan yang dibuat dan diisi oleh atasan, yang didalamnya berisi tentang *detail* pekerjaan yang akan dikerjakan dan berupa data dari pegawai yang akan ditugaskan serta hal yang paling penting adalah jam absensi kerja lembur dari pegawai. Jika pegawai selesai melakukan pekerjaan lembur maka SPKL tersebut akan di rekapitulasi oleh administrator untuk selanjutnya akan ditinjau dan diberikan kepada pihak yang berwenang untuk menghitung upah lembur (Ariawan & Wahyuni, 2015). Melalui SPKL tersebut dapat diketahui pegawai yang bekerja lembur beserta jam kerja lembur yang dilakukannya sehingga menjadi bukti bagi pihak yang menghitung upah lembur untuk menghindari kesalahan dalam melakukan perhitungan upah lembur.

PT PAL INDONESIA terkhusus Divisi Harkan memiliki dua jenis pegawai yakni pegawai *outsourcing* dan pegawai organik. Pegawai *outsourcing* adalah pegawai yang berasal dari Perusahaan penyedia sumber daya manusia (SDM) sebagai tenaga kerja sedangkan pegawai organik adalah pegawai yang administrasinya diakui secara penuh oleh PT PAL INDONESIA. Aplikasi ini diperuntukan kepada pegawai *outsourch* dikarenakan PT PAL INDONESIA sudah memiliki sistem informasinya sendiri untuk mempermudah pekerjaan bagi pegawai organiknya terkhususnya untuk mengatur kerja lembur.

2.2. Tinjauan Studi

2.2.1. Aplikasi Pengajuan Lembur Karyawan Berbasis Web Ariawan & Wahyuni (2015)

Penelitian ini dilakukan oleh Ariawan & Wahyuni (2015) dengan judul “Aplikasi Pengajuan Lembur Karyawan Berbasis Web”. Tujuan Penelitian ini untuk meminimalisir kesalahan dalam perhitungan total jam lembur dan efisiensi untuk pengajuan surat perintah kerja lembur (SPKL). Pembuatan Aplikasi Pengajuan Lembur Karyawan Berbasis Web menjadi solusi dari permasalahan yang diangkat dari penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penulis telah berhasil membuat aplikasi *website* untuk pengajuan SPKL serta perhitungan kerja lembur guna menyelesaikan masalah yang diteliti, hal tersebut juga menjadi kelebihan yang ada di dalam penelitian ini. Kelemahan dari penelitian ini adalah penulis tidak menuliskan secara jelas apa rumusan masalahnya dan juga penelitian ini belum mencantumkan parameter uji terhadap penyelesaian rumusan masalah. Perbedaan dengan Tugas Akhir ini adalah melakukan pengembangan teknologi *QR code* untuk pengamanan tanda persetujuan SPKL dari atasan, yang sebelumnya tidak ada di dalam penelitian ini.

2.2.2. Rancang Bangun Sistem Informasi Perintah Kerja *Overtime* Pegawai Berbasis Web pada PT PLN Batam Tukino (2018)

Penelitian ini dilakukan oleh Tukino, 2018 dengan judul “Rancang Bangun Sistem Informasi Perintah Kerja *Overtime* Pegawai Berbasis Web pada PT PLN Batam”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mempercepat administrasi pelaporan upah lembur yang selama ini berjalan lambat. Pembuatan sistem informasi berbasis web menjadi solusi utama bagi penulis untuk menyelesaikan masalah yang diangkat. Hasil dari penelitian ini meningkatkan produktivitas karena pembuatan SPKL lebih cepat dan juga mempermudah pengarsipan data yang tersimpan di basis data. Dua hal tersebut sudah menjadi kelebihan dari penelitian ini karena sudah berhasil menyelesaikan masalah utama yang diangkat dalam penelitian ini. Kelemahan dari penelitian ini adalah tidak dicantumkan secara jelas rumusan masalahnya sehingga tidak ada tolok ukur untuk tingkat keberhasilan menjawab dari masalah ini. Perbedaan dari tugas akhir ini adalah di dalam tugas akhir ini akan mengimplementasikan teknologi *QR code* sebagai peningkat keamanan tanda persetujuan dari atasan terkait SPKL yang dibuat, sehingga mengurangi risiko terjadinya kecurangan.

2.2.3. Rancang Bangun Sistem Informasi Perhitungan *Overtime* Karyawan *Outsourcing* pada PT Pertamina Gas Berbasis Web (Prakoso et al., 2023)

Penelitian ini dilakukan oleh Ibnu Bagus Wahyu Prakoso, Sharyanto, Bernadus Gunawan Sudarsono (2023) dengan judul “Rancang Bangun Sistem Informasi Perhitungan *Overtime* Karyawan *Outsourcing* pada PT. Pertamina Gas Berbasis Web”. Tujuan penelitian ini adalah pembuatan sistem informasi perhitungan *overtime* pegawai untuk melakukan *control* perhitungan pengajuan SPKL karena terlalu banyak pengajuan SPKL yang ada membuat anggaran biaya Perusahaan membengkak. Hasil dari penelitian ini adalah terciptanya sistem informasi perhitungan *overtime* karyawan. Kelebihan dari penelitian ini penulis sudah berhasil dalam menyelesaikan masalah yang diangkatnya. Kelemahan dari penelitian ini adalah rumusan masalah dan juga pengujian terhadap rumusan masalah tidak dicantumkan sehingga tidak dapat disimpulkan secara jelas pengujian terkait keberhasilan dari penulis untuk menyelesaikan masalahnya. Perbedaan dengan Tugas Akhir yang akan dibuat ini adalah implementasi dari teknologi *QR code* yang menjadi pengamanan bukti persetujuan SPKL oleh atasan sedangkan penelitian tersebut hanya menyebutkan pembuatan sistem informasinya hanya menggunakan bahasa pemrograman *PHP* dan basis data *MySQL*.

2.2.4. Peraturan dan Birokrasi Alur Kerja Lembur Divisi Harkan PT PAL Indonesia

Standar operasional prosedur kerja lembur penting untuk dimiliki oleh perusahaan. Prosedur kerja lembur yang ditentukan oleh perusahaan bertujuan untuk menetapkan dan memberikan petunjuk agar tercapai efektivitas dan efisiensi organisasi (PT PAL Indonesia, 2003). Standar ini diberlakukan untuk seluruh unit kerja PT PAL Indonesia. Perintah kerja lembur harus dibuat secara hierarki, dimulai dari kepala bengkel/biro. Kepala bengkel/biro mengisi data yang sesuai dengan kebutuhan, jika sudah sesuai dan ditandatangani maka SPKL dapat diteruskan kepada kepala departemen yang selanjutnya kepada kepala manajer proyek. Ketiga atasan yang telah menandatangani SPKL tersebut menunjukkan bahwa pegawai dapat memulai melakukan pekerjaan lembur yang diperintahkan. Kepala bengkel dapat melakukan *input* jam realisasi yang berisi waktu efektif kerja lembur dihitung dari jam absensi pegawai setelah selesainya pelaksanaan lembur. Semua SPKL yang sudah valid dapat diteruskan kepada SDM Divisi Harkan untuk dilakukan pengecekan dan revisi jam realisasi jika diperlukan, sehingga dapat segera direkapitulasi.